

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Indopos

Saatnya Bangun RS Khusus Corona

JAKARTA-Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi, mengusulkan agar Jakarta memiliki rumah sakit khusus untuk penanganan pasien Covid-19 atau untuk darurat musibah lainnya. Hal tersebut atas pertimbangan wilayah yang telah menjadi zona merah penyebaran virus Corona (Covid-19).

"Jakarta sebagai ibu kota harus jadi teladan dalam menangani berbagai persoalan, keadaan darurat dan krisis, salah satunya adanya RS khusus tersebut, jangan sampai kalah dengan wilayah lain," kata Suhaimi, di Jakarta, Minggu (26/4/2020). Politisi PKS itu mengatakan, segala yang terjadi di Jakarta menjadi sorotan dunia. Ditambah lagi Pemprov DKI harus ekstra kerja keras mencari solusi bagi warga yang terdampak.

"Warga yang kehilangan pekerjaan, tidak dapat membayar kontrakan, yang tidur di emperan toko, tidak dapat makan harus menjadi prioritas perhatian Pemprov DKI dan stake holder lainnya, jangan sampai mereka melakukan tindakan kriminal," ujarnya. Yang tak kalah penting juga, kepada tenaga kesehatan dan paramedis harus diberikan perhatian lebih dan menjamin kesejahteraan yang layak dan memadai.

"Mereka sebagai garda terdepan, sudah selayaknya mendapatkan apresiasi yang tinggi di Jakarta," ungkap Ketua Dewan Syariah Wilayah PKS DKI Jakarta itu.

Cukup Baik

Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) periode kedua di Jakarta memasuki hari ke ketiga. PSBB kedua ini diterapkan pada Jumat (24/4/2020) selama 28 hari ke depan atau sampai dengan 22 Mei 2020.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat

at Daerah (DPRD) DKI Jakarta Muhammad Taufik, menilai PSBB di Jakarta secara umum sudah cukup baik. "Tinggal yang tahap II ini harus ada pengawasan lebih ketat dan kalau perlu ada sanksi," ujarnya saat dihubungi Wartawan, Minggu (26/4/2020).

Politisi Partai Gerindra ini pun mengapresiasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang bertindak responsif selama ini dalam menangani pandemi Covid-19 di Jakarta. "Mudah-mudahan selesai PSBB kedua ini, Corona memudar penularannya," ujar ketua Gerindra DKI itu.

Taufik menekankan kepada Pemprov DKI Jakarta untuk dapat lebih tegas dalam memberikan pengawas di masa PSBB kedua ini. Termasuk dalam hal pendistribusian bantuan sosial (Bansos). "Sesuatu itu harus dievaluasi secara komprehensif. Misalkan sembako. Dari 1,2 juta yang miskin misal ada memperbaiki data ya oke saja. Tinggal di pengawasannya aja, lebih

ketat dan diberi sanksi," pungkasnya.

Carut Marut

Anggota DPRD DKI Jakarta Komisi D dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth meminta kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini Dinas Sosial (Dinsos) dan PD Pasar Jaya agar tepat sasaran terkait pembagian bantuan sosial (Bansos). Menurutnya, bansos itu untuk warga kurang mampu yang terdampak langsung pandemi wabah Covid-19.

Pasalnya, kata pria yang kerap disapa Kent itu, dirinya banyak mendapatkan laporan langsung dari warga terkait pembagian bansos yang dinilai tidak tepat sasaran. Banyak bansos menasar ke warga Jakarta yang dianggap mampu.

Diketahui, penerimaan Bansos selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta, sesuai Keputusan Gubernur Nomor 386 Tahun 2020, diterima sebanyak 1.194.633 Kepala Keluarga (KK). Tapi pada kenyataan-



BANYAK - DPW PKS DKI Jakarta memberikan bantuan sosial (bansos) untuk warga DKI Jakarta dan kadernya senilai Rp 2,2 miliar.

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Indopos

Saatnya Bangun RS Khusus Corona



Jakarta sebagai ibu kota harus jadi teladan dalam menangani berbagai persoalan, keadaan darurat dan krisis, salah satunya adanya RS khusus tersebut.”

Abdurrahman Suhaimi
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta

nya di lapangan banyak warga yang tidak menerima bantuan tersebut. "Banyak laporan kepada saya, bahwa pembagian bansos tidak tepat sasaran. Jadi jangan sampai pembagian bansos itu malah diberikan kepada warga Jakarta yang mampu dan merugikan warga yang tidak mampu, ya walaupun kami tahu semua warga Jakarta terkena dampak pandemi wabah Covid-19 ini. Tapi, kami bisa lihat dengan jelas, siapa yang lebih membutuhkan bansos tersebut," kata Kent.

Diirnya juga meminta kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar terang benderang terkait pembagian bansos tersebut. Apakah memang sudah mempunyai data warga yang berhak menerima bansos, atau hanya mengandalkan data tidak mampu yang sudah lama yang terdapat di dinas sosial, sehingga pembagian tidak tepat sasaran.

"Seharusnya berapa bulan sekali data warga yang tak mampu di Provinsi DKI Jakarta harus di-data ulang kembali,

RT dan RW harus di fungsikan secara maksimal dalam pengumpulan data warga, karena memang saat ini banyak warga yang benar-benar tak mampu tidak mendapatkan bantuan. Jadi jangan lantas nanti orang mati kelaparan, dikira mati karena terpapar Covid-19," katanya.

Kent juga mengapresiasi dan menyampaikan atas kerja keras para Ketua RT, RW dan jajarannya dalam membagikan bansos kepada masyarakat yang membutuhkan. "Pak RT dan RW harus menggunakan mata dan hati dalam membagikan bansos ini, bagikan kepada yang benar-benar membutuhkan," tuturnya. Menurutnya, warga yang tidak mendapatkan Bansos tersebut berhak mengisi formulir permohonan bansos susulan kepada Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) setempat. Hal itu agar data tersebut bisa kembali diverifikasi oleh pihak kelurahan, dan akan diteruskan kepada Dinas Sosial. (dni)